

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Strukturalisme Konflik**

Konflik berasal dari kata kerja *configere* yang maknanya adalah saling memukul. Sementara istilah *conflict* dalam bahasa Inggris berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan yang berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Istilah tersebut memberikan penjelasan bahwa sebuah konflik berlaku kerana adanya interaksi fizikal oleh dua pihak atau lebih. Hal ini menunjukkan bahawa konflik merupakan interaksi sosial yang melibatkan hubungan antara individu (Pruitt 2004). Konflik menjadi sebuah fakta kehidupan yang tak dapat dihindari, yang melekat pada jaringan kehidupan. Konflik atau perlawanan antara kumpulan atau komuniti merupakan bentuk dari pada interaksi sosial, yang dapat berlaku pada masyarakat manapun, yang mana pelbagai perbezaan kepentingan saling berbenturan sehingga menciptakan konflik dalam pelbagai darajatnya.

Berkaitan dengan kondisi integrasi di dalam sebuah sistem sosial, Talcott Parsons menyatakan bahawa tidak ada sistem sosial yang terintegrasi secara sempurna, kerana selalu ada kemungkinan berlaku: a) ketidaksesuaian dalam prioritas bagi nilai-nilai yang berbeza ; b) interpretasi yang saling bertentangan mengenai nilai-nilai bersama ; c) konflik peranan ; d) motivasi ambivalen atau negatif ; e) ketegangan antara kebutuhan individu dan peranan yang ditentukan secara budaya ; f) harapan individu yang tidak tetap. Konflik sosial merupakan gejala ketegangan yang harus diatasi oleh sistem untuk mempertahankan keseimbangan keperluan atau kepentingan individu. Hubungan antara individu yang mengalami ketegangan secara konsisten tunduk pada persyaratan sistem keseluruhan untuk mempertahankan keseimbangan dan stabilitas sosialnya (Johnson 1986; Ritzer 1988).

Beberapa proposisi penting mengenai konflik menurut pemikiran Marx menjelaskan hubungan kepentingan antara kumpulan dominan yang kuat dan

memiliki power, dengan kumpulan subordinat yang lemah dan tidak memiliki power. Marx menggambarkan tingkat *inequality* didalam distribusi sumberdaya langka, menentukan konflik kepentingan antara kumpulan yang menguasai power dengan yang tidak menguasainya. Proposisi-proposisi penting yang dimaksudkan iaitu sebagai berikut (Turner 1978; Wirawan 2012) :

1. Semakin tidak merata distribusi sumberdaya langka dalam suatu sistem, semakin besar konflik kepentingan antara segmen dominan (kumpulan kuat) dan segmen subordinat (kumpulan lemah) dalam sistem tersebut.
2. Semakin menyadari segmen subordinat akan kepentingan kolektif, semakin besar kemungkinan mereka mempertanyakan keabsahan distribusi sumber yang tidak merata.
  - A. Perubahan sosial yang diciptakan oleh segmen dominan semakin mengacaukan hubungan yang ada di antara para subordinat, maka semakin besar kemungkinannya segmen subordinat menyadari kepentingan kolektif mereka.
  - B. Semakin praktik-praktik segmen dominan menimbulkan disposisi keterasingan di antara segmen subordinat, maka semakin besar kemungkinan kumpulan lemah tersebut menyadari kepentingan kolektif mereka.
  - C. Semakin segmen subordinat dapat saling berkomunikasi mengenai keluhan-keluhan mereka, maka semakin besar kemungkinan kumpulan lemah tersebut menyadari kepentingan kolektif mereka.
    - 1) Semakin konsentrasi anggota dari pada kumpulan subordinat bersifat spasial, maka semakin besar kemungkinan mereka akan menyampaikan (berkomunikasi tentang) keluhan-keluhan mereka.
    - 2) Semakin kumpulan subordinat memiliki akses kepada media pendidikan, semakin beraneka-ragam cara komunikasi mereka, maka semakin besar kemungkinan menyampaikan (berkomunikasi tentang) keluhan-keluhan mereka.
  - D. Semakin segmen subordinat dapat mengembangkan kesatuan sistem keyakinan, maka semakin besar kemungkinan mereka menjadi sadar kepada kepentingan kolektif mereka yang sesungguhnya.

- 1) Semakin besar kemampuan untuk mendapatkan (*to recruit*) juru bicara ideologis, maka semakin besar kemungkinan berlakunya penyatuan ideology mereka
- 2) Semakin kecil kemampuan kumpulan dominan mengatur proses sosialisasi dan jaringan komunikasi di dalam suatu sistem, maka semakin besar kemungkinan berlakunya penyatuan ideologis pada kumpulan subordinat
3. Semakin segmen subordinat dalam suatu sistem menyadari kepentingan kolektif mereka, semakin kuat mereka mempertanyakan keabsahan (*legitimacy*) distribusi sumberdaya langka, maka semakin besar kemungkinan mereka mengorganisir untuk memulai konflik terbuka dengan segmen dominan.
  - a. Semakin besar kemerosotan (*deprivation*) kumpulan subordinat bergerak dari dasar absolut ke dasar relative, maka semakin besar kemungkinan mereka menyusun dan memulai konflik
  - b. Semakin kumpulan dominan kehilangan kemampuan untuk menyatakan kepentingan kolektif mereka, semakin besar kemungkinan kumpulan subordinat menyusun dan memulai konflik
  - c. Semakin besar kemampuan kumpulan subordinat mengembangkan struktur kepemimpinan, semakin besar kemungkinan mereka menyusun dan memulai konflik
4. Semakin segmen subordinat disatukan oleh keyakinan bersama dan semakin berkembang struktur kepemimpinan politik mereka, maka segmen dominan dan segmen-segmen yang dikuasai dalam sistem tersebut akan mengalami polarisasi.
5. Semakin besar polarisasi antara segmen dominan dengan segmen yang dikuasai, maka akan semakin keras konflik yang berlaku.
6. Semakin keras suatu konflik, maka semakin besar perubahan struktur sebuah sistem dan redistribusi sumberdaya langka.

Penjelasan struktural terhadap fenomena konflik sosial merujuk kepada perspektif konflik Ralf Dahrendorf yang mementingkan elemen-elemen struktur sosial sebagai dasar terciptanya konflik sosial. Konflik didasari oleh susunan-

susunan struktural tertentu, yang oleh kerananya selalu cenderung melahirkan susunan struktural sebagai yang telah ada. Dengan demikian Dahrendorf menghubungkan konflik dengan struktur sosial tertentu, dan bukan menganggapnya berhubungan dengan variabel-variabel psikologis (sifat-sifat agresif) atau variabel historis deskriptif dan variabel kebetulan (Poloma 2003)

Selanjutnya Dahrendorf menyatakan bahwa pendekatan konflik berpangkal pada anggapan-anggapan dasar sebagai berikut :

1. Setiap masyarakat sentiasa berada dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir atau dengan kata lain perubahan sosial merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat. Masyarakat merupakan suatu proses sosial dan memiliki sifat yang dinamis, dimana keadaan masyarakat selalu berubah sesuai dengan fenomena-fenomena yang berlaku di dalam masyarakat tersebut dalam waktu yang terus berterusan.
2. Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik didalam dirinya atau dengan kata lain konflik ialah merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat, salah satu yang dapat mempengaruhi perubahan ditengah-tengah masyarakat adalah konflik di masyarakat tersebut.
3. Setiap unsur di dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi berlakunya *disintegrasi* dan perubahan sosial.
4. Setiap masyarakat terintegrasi diatasi penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang.

Dahrendorf melihat kumpulan-kumpulan yang bertentangan sebagai kumpulan yang lahir dari kepentingan-kepentingan bersama para individu yang mampu berorganisasi. Pada asosiasi yang ditandai oleh pertentangan, terdapat ketegangan antara mereka yang ikut dalam struktur kekuasaan dan yang tunduk pada struktur itu. Secara empiris, pertentangan kumpulan mungkin paling mudah dianalisis jika dilihat sebagai pertentangan mengenai legitimasi hubungan-hubungan kekuasaan. Dalam setiap asosiasi, kepentingan kumpulan penguasa merupakan nilai-nilai yang merupakan ideologi keabsahan kekuasaannya, sementara kepentingan-kepentingan kumpulan bawah melahirkan ancaman bagi ideologi ini serta hubungan-hubungan sosial yang terkandung di dalamnya. Setiap kumpulan atau sistem sosial terbagi ke dalam berbagai kepentingan, yakni :

kepentingan orang-orang yang menguasai kepemilikan material, dan orang-orang yang tidak menguasainya (institusi ekonomi), dan kepentingan mereka yang memiliki dominasi otoritatif dan mereka yang harus tunduk pada penggunaan otoritas tersebut. Setiap perbezaan kepentingan menempatkan anggota masyarakat pada posisi dominan dan subordinat (Poloma 2003).

Setiap fenomena konflik memiliki intensitasnya masing-masing. Sumber-sumber konflik tertentu menghasilkan konflik dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan konflik yang dihasilkan oleh sumber konflik yang lain. Intensitas, merujuk pada pengeluaran energi dan keterlibatan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik. Dua variabel utama yang mempengaruhi intensitas adalah tingkat keserupaan (konsistensi) konflik di pelbagai asosiasi yang berbeza serta tingkat mobilitas. Tingkat konsistensi yang tinggi bermakna, para anggota dari kumpulan konflik saling berkonfrontasi dalam berbagai hubungan asosiasional. Hal ini berlaku kerana orang yang dominan pada satu asosiasi, juga dominan dalam asosiasi yang lain, sedangkan yang subordinat pada satu asosiasi juga demikian pada asosiasi yang lain. Selain itu, kesempatan untuk konflik yang luas dan mendalam akan semakin besar kalau tak satupun dari asosiasi yang terlibat mampu menyediakan peluang untuk mobilitas keatas. Semakin besar konsistensi antara persebaran penghargaan ekonomis, status sosial atau prestise, dan sebagainya, dengan persebaran otoritas, maka semakin besar pula intensitas konflik kelas (Johnson 1986; Poloma 2003).

Berbeda dengan intensitas konflik, maka kekerasan merujuk pada alat yang digunakan oleh pihak yang saling bertentangan untuk mengejar kepentingan. Tingkat kekerasan boleh sangat bervariasi, mulai dari negosiasi yang penuh ketenangan sampai pada kekerasan terbuka, termasuk serangan fisik atas manusia dan miliknya. Tingkat deprivasi sosio ekonomis daripada mereka yang berada dalam posisi subordinat, merupakan faktor yang dapat membawa impak pada munculnya konflik yang keras.

Sehubungan dengan konflik sosial, George Simmel (Turner 1978; Wirawan 2012) mengembangkan tiga perangkat proposisi tentang intensitas konflik bagi pihak yang terlibat dan fungsi konflik bagi sistem keseluruhan, dalam rangkaian proposisi tentang intensitas konflik. George Simmel mengemukakan

bahawa semakin tinggi derajat keterlibatan emosional pihak yang terlibat dalam suatu konflik, maka semakin kuat kecenderungan untuk mengarah pada kekerasan. Dalam konteks ini ada korelatif positif antara solidaritas antar anggota dalam suatu kumpulan dengan derajat keterlibatan emosional. Demikian pula ada korelasi positif antara harmoni awal (*pervious harmony*) antara anggota kumpulan yang bertikai dengan derajat keterlibatan emosional mereka. Selanjutnya, semakin suatu konflik dianggap telah merintangai pencapaian tujuan dan kepentingan individu oleh para anggota kumpulan yang bertikai, maka konflik itu cenderung menjadi kekerasan.

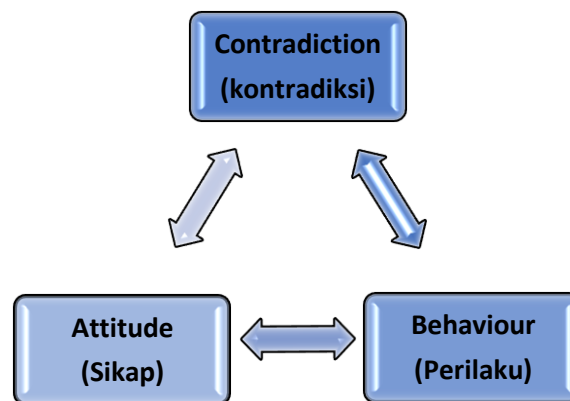
### **2.1.2 Teori Galtung tentang Munculnya Konflik dalam Masyarakat**

Kajian ini merujuk kepada teori kekerasan struktural dan kultural dari Johan Galtung. Johan Galtung mengatakan bahawa konflik dapat dilihat sebagai sebuah segitiga, dengan kontradiksi (*Contradiction = C*), sikap (*Attitude = A*), perilaku (*Behaviour = B*) pada puncak-puncaknya. Kontradiksi merujuk pada dasar situasi konflik, termasuk “ketidakcocokan tujuan” yang ada atau dirasakan oleh pihak-pihak yang bertikai, yang disebabkan oleh “ketidakcocokan antara nilai sosial dan struktur sosial”. Kontradiksi ditentukan oleh pihak-pihak yang bertikai, hubungan mereka, dan benturan kepentingan inheren di antara mereka (Galtung 1973; Liliweri 2009).

Sikap ialah persepsi pihak-pihak yang bertikai dan kesalahan persepsi antara mereka dan dalam diri mereka sendiri, merupakan persepsi tentang isu-isu tertentu yang berkaitan dengan kumpulan lain. Dalam konflik dan kekerasan, pihak-pihak yang bertikai cenderung mengembangkan stereotip yang merendahkan satu sama lain. Sikap ini sering dipengaruhi oleh emosi seperti takut, marah, kepahitan, atau kebencian. Sikap tersebut termasuk elemen emotif (perasaan), kognitif (keyakinan) dan konatif (kehendak). Perilaku yang merupakan kerjasama atau pemaksaan, gerak tangan atau tubuh yang menunjukkan persahabatan atau permusuhan. Perilaku konflik dengan kekerasan dicirikan oleh ancaman, pemaksaan, dan serangan yang merusak.

Kontradiksi ialah kemunculan situasi yang melibatkan masalah sikap dan perilaku sebagai suatu proses. Dalam hal ini kontradiksi diciptakan oleh unsur

persepsi dan gerak kumpulan yang terlibat, yang hidup dalam persekitaran sosial. Secara sederhana, sikap melahirkan perilaku, kemudian melahirkan kontradiksi atau situasi. Sebaliknya, situasi boleh melahirkan sikap dan perilaku. Konsep mengenai situasi kontradiksi yang didahului oleh sikap dan perilaku ini digambarkan pada skema segitiga ABC Galtung (lihat Rajah 2.1). Galtung berpendapat bahawa tiga komponen harus muncul dalam sebuah konflik total. Struktur konflik tanpa sikap atau perilaku konfliktual merupakan sebuah konflik laten. Galtung melihat konflik sebagai proses dinamis, dimana struktur, sikap, dan perilaku secara konstan berubah dan saling mempengaruhi. Ketika konflik muncul, kepentingan pihak-pihak yang bertikai masuk ke dalam konflik atau hubungan dimana mereka berada. Kemudian pihak-pihak yang bertikai mengorganisasi diri di sekitar struktur ini untuk mengejar kepentingan mereka. Mereka mengembangkan sikap yang membahayakan dan perilaku konfliktual, sehingga formasi konflik mulai tumbuh dan berkembang.



Gambar 2.1: Segitiga ABC Galtung  
Sumber : Johan Galtung (1973)

Konflik dapat melebar, menimbulkan konflik sekunder pada pihak-pihak utama, atau pihak-pihak yang terseret masuk. Hal ini akan merumitkan tugas menyelesaikan konflik intinya, dan pada akhirnya penyelesaian konflik harus melibatkan seperangkat perubahan dinamis, yang melibatkan penurunan perilaku konflik, perubahan sikap, dan transformasi hubungan atau kepentingan yang berbenturan, yang berada dalam inti struktur konflik (Liliweri 2009; Susan 2009).

Pembahasan tentang konflik selalu mengarah pada upaya penyelesaiannya serta analisis mengenai sumber-sumber penyebab munculnya konflik tersebut. Salah satu penjelasan mengenai sumber konflik yang diajukan oleh para pemerhati konflik adalah, adanya kelangkaan sumber daya untuk pemenuhan keinginan dan keperluan hidup individu dan masyarakat. Keadaan ini akan membuat banyak orang merasa tidak puas atas ketidakadilan distribusi sumber daya tersebut, dan ketika berlaku ketidakpuasan, maka akan berlaku konflik (Liliweri 2009).

Sehubungan dengan kelangkaan sumber pemenuhan keperluan hidup, maka setidaknya terdapat tiga faktor yang menjadi sumber konflik antara dua pihak, yaitu kepentingan (*interest*), kekuasaan (*power*), dan hak (*right*), yang mana :

- 1) Kepentingan sebagai obyek keperluan dan keinginan yang menjadi sumber konflik. Kedua pihak mempunyai keperluan dan keinginan yang sama terhadap obyek yang disengketakan, misalnya barang, uang, jasa layanan, dan lain-lain
- 2) Kekuasaan sebagai obyek keperluan dan keinginan yang menjadi sumber konflik. Kedua pihak mempunyai keperluan dan keinginan yang sama untuk memperoleh status dan peranan sehingga memiliki kewenangan yang dominan
- 3) Hak sebagai obyek keperluan dan keinginan yang menjadi sumber konflik. Kedua pihak mempunyai keperluan dan keinginan yang sama untuk memperoleh tuntutannya, kerana masing-masing merasa bahawa tuntutan itu berkaitan dengan hak dan tanggungjawabnya.

Salah satu bentuk penyelesaian konflik yang mungkin ditawarkan ialah dengan memenuhi kepentingan semua pihak. Akan tetapi penyelesaian ini hanya menghentikan konflik untuk sementara waktu. Apabila sumber daya yang diperebutkan telah habis, maka situasi konflik akan muncul kembali. Cara yang lain, yaitu menyerahkan kekuasaan atau hak kepada salah satu pihak merupakan solusi konflik yang tidak berdampak kepada integrasi sosial. Cara ini adalah sebuah bentuk penyelesaian yang bersifat *zero-sum solution*, dan akan diikuti oleh penyalahgunaan wewenang dan hak oleh pihak dominan, yang kemudian akan



menimbulkan konflik yang baru. Oleh kerana itu, konflik sosial seringkali memiliki sifat berulang sesudah beberapa tahun mereda. Konflik sedemikian adalah kerana sumber konflik yang sebenarnya sulit terungkap, dan konflik tidak dapat diselesaikan dengan sepenuhnya. Selalu masih tersisa perbezaan-perbezaan yang akan memicu konflik pada masa-masa mendatang.

Johan Galtung menciptakan tiga dimensi kekerasan, yaitu kekerasan struktural, kekerasan kultural, dan kekerasan langsung. Kekerasan langsung seringkali didasarkan atas penggunaan kekuatan sumberdaya (*resource power*). Kekuatan sumberdaya boleh dibagi menjadi kekuatan *punitive* yaitu kekuatan yang menghancurkan. Kemudian, kekuatan ideologis, kekuatan remuneratif yang cenderung menciptakan kekerasan budaya. Galtung mendefinisikan kekerasan budaya sebagai aspek budaya, yaitu ruang simbolik keberadaan manusia seperti agama dan ideologi, bahasa dan seni, ilmu empirik dan ilmu formal (logika, matematika), yang dapat dipakai untuk melegitimasi kekerasan langsung atau kekerasan struktural. Sedangkan kekerasan struktural tercipta dari penggunaan kekuasaan struktural atau penggunaan otoritas (wewenang) untuk menciptakan sebuah kebijakan. Jadual 2.2 ialah tipologi kekerasan yang disebutkan oleh Galtung (Galtung 1990).

Tabel 2.1: Tipologi kekerasan Galtung (*Galtung's typology of violence*)

	<b>Survival needs</b>	<b>Well-being needs</b>	<b>Identity needs</b>	<b>Freedom needs</b>
<b>Kekerasan langsung</b>	Killing	Maiming, siege, misery, sanction	Desocialization, resocialization, second citizen	Repression, detention, expulsion
<b>Kekerasan struktural</b>	exploitation	exploitation	Penetration, segmentation	Marginalization, fragmentation

Sumber : Johan Galtung (1990)

Kekuatan sumberdaya dan kekuasaan struktural saling memperkuat. Galtung mengungkapkan bahawa kekerasan struktural, kultural, dan langsung dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan-kebutuhan dasar ini adalah kelestarian dan keberlangsungan hidup (*survival needs*), kesejahteraan (*well-being needs*), kebebasan (*freedom needs*), dan identitas (*identity needs*). Jika empat kebutuhan dasar ini mengalami tekanan atau kekerasan dari kekuasaan

personal dan struktural, maka konflik kekerasan akan muncul (Galtung 1973; Susan 2009)

### 2.1.3 Pengendalian Konflik

Kemampuan sebuah masyarakat mengelola perselisihan kepentingan dan konflik erat kaitannya dengan mutu dan legitimasi struktur, lembaga, dan tata aturannya. Kunci untuk penyelesaian konflik secara damai ialah dengan mengembangkan lembaga-lembaga demokrasi yang stabil dan menghormati hak asasi manusia (Anwar 2005). Katup penyelamat (*safety-valve*) merupakan salah satu mekanisme khusus yang dipakai untuk mempertahankan kumpulan dari kemungkinan konflik sosial, membiarkan luapan permusuhan tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur, dan membersihkan suasana dalam kumpulan yang sedang kacau. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lewis A. Coser melihat katup penyelamat itu sebagai jalan keluar yang dapat meredakan permusuhan antara dua pihak yang berlawanan. Lewat katup penyelamat (*safety-valve*) permusuhan dihambat dan diungkapkan dengan cara-cara yang tidak mengancam atau merusakkan solidaritas. Tetapi penggantian yang demikian mencakup juga biaya bagi sistem sosial maupun bagi individu : mengurangi tekanan untuk menyempurnakan sistem untuk memenuhi kondisi-kondisi yang sedang berubah maupun membendung ketegangan dalam diri individu, menciptakan kemungkinan tumbuhnya ledakan-ledakan destruktif (Johnson 1986, Poloma 2003).

Secara umum, ada tiga macam bentuk pengendalian konflik, yakni : a) Konsiliasi, yaitu pengendalian konflik yang dilakukan dengan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak bertikai ; b) Mediasi, yaitu pengendalian yang dilakukan apabila kedua-dua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator ; c) Arbitasi, yaitu pengendalian yang dilakukan apabila kedua-dua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik (Kerr dalam Dahrendorf 1986). Ketiga mekanisme pengendalian konflik ini banyak digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan pelbagai konflik sosial yang berlaku.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kerr sebelumnya, mengenai konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, berikut ini terdapat beberapa bentuk akomodasi lainnya. Akomodasi, ialah keadaan yang merupakan hasil dari interaksi yang bersifat damai (Summerdalam Narwoko 2010). Akomodasi sebagai proses sosial berlangsung dalam beberapa bentuk, masing-masing dapat disebutkan dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemaksaan (*coercion*) proses akomodasi yang berlangsung melalui cara paksaan sepihak dan yang dilakukan dengan mengancam sanksi.
2. Kompromi (*compromise*) proses akomodasi yang berlangsung dalam bentuk usaha pendekatan oleh kedua belah pihak yang sadar menghendaki akomodasi, kedua belah pihak bersedia mengurangi tuntutan masing-masing sehingga dapat diperoleh kata sepakat mengenai titik tengah penyelesaian.
3. Pengguna jasa perantara (*mediation*) suatu usaha kompromi yang dilakukan sendiri secara langsung, melainkan dilakukan dengan bantuan pihak ketiga, dan tidak memihak, mencoba mempertemukan dan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa atas dasar itikat kompromi kedua belah pihak.
4. Pengguna jasa penengah (*arbitrate*) suatu usaha penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga. Seperti halnya dengan perantara, penengah ini juga dipilih oleh kedua belah pihak yang bertikai. Tetapi perantara itu sekedar mempertemukan kehendak kompromistis kedua-dua pihak, penengah ini menyelesaikan sengketa dengan membuat keputusan-keputusan penyelesaian atas dasar ketentuan-ketentuan yang ada.
5. Peradilan (*adjudication*) suatu usaha penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga yang memang mempunyai authority untuk menyelesaikan konflik. Pengadilan (hakim) tidaklah dipilih oleh pihak-pihak yang bertikai seperti apa yang berlaku pada proses akomodasi melalui penengah. Akan tetapi, seperti halnya para penengah, para pengadilan (*adjudication*, khusus hakim) itu selalu menggunakan aturan-aturan tertentu sebagai standar penyelesaian sengketa.

6. *Toleration*, suatu bentuk akomodasi yang berlangsung tanpa manifestasi persetujuan formal macam apapun. Pertentangan berlaku kerana individu-individu bersedia menerima perbezaan-perbezaan yang ada sebagai suatu kenyataan, dan dengan kerelaan membiarkan perbezaan itu, serta menghindari diri dari pertelingkahan-pertelingkahan yang mungkin timbul.
7. *Stalemat*, adalah suatu bentuk akomodasi, dimana pihak-pihak yang bertentangan tiba pada suatu posisi “maju tidak boleh dan mundur tidak boleh”. *Stalemate* adalah suatu situasi kemacetan yang stabil, sehingga beberapa pihak mengatakan bahawa stalemate bukanlah proses akomodasi melainkan *resultant* suatu proses akomodasi

Beberapa cara lain yang digunakan dalam usaha mengendalikan konflik, dinyatakan oleh Moore Christopher (Susan 2009). Bentuk-bentuk pengendalian dan proses pengurusan konflik yang dimaksud iaitu:

- a. *Avoidance* ialah pihak-pihak berkonflik saling menghindari dan mengharap konflik boleh terselesaikan dengan sendirinya.
- b. *Informan problem solving* ialah pihak-pihak yang berkonflik setuju dengan pemecahan masalah yang diperoleh secara informal.
- c. *Negotiation* ketika konflik masih terus berlanjut, maka para pihak berkonflik perlu melakukan negosiasi. Artinya mencari jalan keluar dan pemecahan masalah secara formal. Hasil dari negosiasi bersifat prosedural yang meningkat semua pihak yang terlibat dalam negosiasi.
- d. *Mediation* ialah munculnya pihak ketiga yang diterima oleh kedua pihak kerana dipandang boleh membantu parah pihak berkonflik dalam penyelesaian konflik secara damai.
- e. *Executivedispute resolution approach* iaitu kemunculan pihak lain yang memberi suatu bentuk penyelesaian konflik.
- f. *Arbitration* suatu proses tanpa paksaan dari para pihak berkonflik untuk mencari pihak ketiga dipandang netral atau imparial.
- g. *Judicial approach* berlakunya intervensi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang dalam memberi kepastian hukum.

Langkah-langkah penyelesaian konflik dan pertikaian sosial mana yang sesuai tentunya sangat bergantung kepada sumber konflik, pencetus konflik, keterlibatan pihak-pihak yang berkonflik serta tingkat intensitas konflik. Faktor pencetus konflik dan pertikaian kerap kali bukan merupakan sumber konflik yang sebenarnya. Pencetus konflik ialah suatu tindakan atau kejadian yang langsung mencetuskan pertikaian antara kedua-dua pihak. Sedangkan sumber konflik merupakan akar permasalahan yang harus ditarik jauh ke belakang secara historis, yang akan memberikan penjelasan secara substansi mengenai asal-muasal kebencian antara pihak-pihak yang bertikai.

Pengendalian atau penyelesaian konflik yang hanya berasas kepada faktor pencetus konflik, tidak akan menghasilkan sebuah solusi yang menyeluruh dan mendalam, namun mungkin hanya akan meredam pertikaian atau kekerasan pada masa yang singkat sahaja, dan tidak lama kemudian akan muncul pertikaian yang serupa, bahkan mungkin dengan intensitas yang lebih kuat. Oleh itu, beberapa konflik yang berlaku tidak dapat benar-benar dihapuskan, dan akan berulang pada bilangan masa tertentu. Sumber setiap pertikaian ialah kebencian yang tersimpan. Apabila kebencian kepada pihak yang berkuasa tidak mampu diungkapkan, maka akan berlaku *transfer of hate*, iaitu kebencian yang dialihkan kepada pihak lain yang mewakili kepentingan lawan yang berkuasa tersebut. Pada keadaan seperti ini tentu konflik dan pertikaian menjadi fenomena yang sangat sukar untuk diselesaikan, terutama untuk mendapatkan sumber konfliknya, kerana sebenarnya pada setiap pertikaian memiliki nilai pembedanya sendiri.

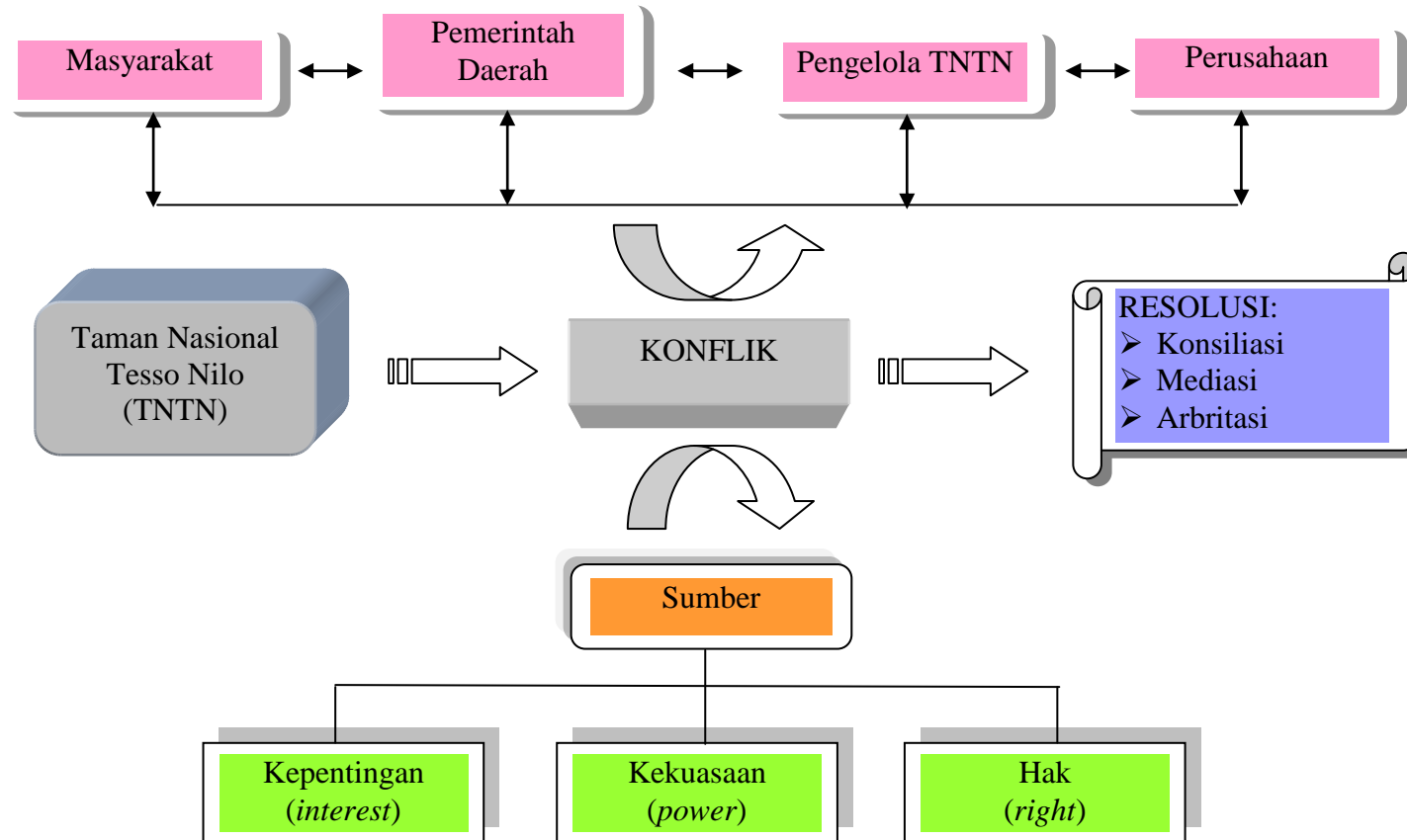
Dalam rangka upaya pembangunan sosial ekonomi perdesaan sekitar hutan Tesso Nilo saat ini dibutuhkan strategi khusus yang mampu mengintegrasikan tujuan konservasi alam, perbaikan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan dan penguatan fiskal bagi pembangunan daerah secara terpadu. Untuk itulah diperlukan suatu pendekatan pengelolaan pembangunan perdesaan sekitar kawasan hutan Tesso Nilo (yang sebagaimana kini sudah ditetapkan sebagai Taman Nasional Tesso Nilo) yang menganut prinsip “dari pembangunan konservasi untuk pembangunan ekonomi ke arah pembangunan ekonomi untuk pembangunan berkelanjutan”.

Upaya mengembangkan pembangunan konservasi ini membutuhkan strategi yang integral dengan pembangunan sosial ekonomi masyarakat desa-desa di sekitar hutan mengingat sejatinya masyarakat perdesaan sekitar hutan adalah bagian tidak terpisahkan dari pemangku kepentingan utama pembangunan itu sendiri. Secara khusus dalam upaya pembangunan TNTN, persepektif ini menjadi sangat relevan karena sesuai pula dengan visi pembangunan daerah Provinsi Riau yang memprioritaskan penanggulangan K2I (kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur) yang antara lain dengan memberikan perhatian khusus terhadap upaya untuk membangun otonomi desa. Inilah momentum untuk membuktikan komitmen berbagai pihak dalam menyelaraskan pembangunan daerah yang mampu mengakomodasi asas-asas fungsi ekologis, ekonomis dan sosial budaya dalam membangun kehidupan yang lebih berkualitas di perdesaan sekitar kawasan hutan Tesso Nilo Provinsi Riau.

Secara teoritik, masalah pembangunan perdesaan di sekitar hutan dapat dijelaskan sebagai masalah persaingan yang kompleks antara kepentingan konservasi untuk pelestarian lingkungan alam dengan kepentingan ekonomi dan sosial dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Hal ini meliputi kepentingan yang terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam tradisi dan pengalaman praktek-praktek pemanfaatan sumberdaya hutan maupun yang terkait dengan persaingan antara usaha ekonomi “kapitalistik” dengan usaha ekonomi “rakyat” yang tidak seimbang. Hal yang disebutkan terkahir bisanya juga dilingkupi pula masalah struktural dalam pembangunan yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan yang bersifat sentralistik dan uniformitas yang juga sudah cukup lama berlangsung.

Berkenaan dengan ini diperlukan suatu pendekatan terpadu dalam kelola kawasan, kelola usaha dan kelola sosial yang hendaknya mampu mengupayakan rekonsiliasi antara para pemangku kepentingan dalam pembangunan. Pembangunan perdesaan di sekitar hutan dengan sendirinya secara khas juga membutuhkan perhatian penyesuaian terhadap keadaan ekologi, ekonomi, sosial dan budaya setempat dengan memposisikan masyarakat perdesaan sebagai pemangku utama pembangunan.

## 2.2 KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 2.2 : Kerangka Pemikiran “Konflik Antar Pemangku Kepentingan di Taman Nasional Tesso Nilo Provinsi Riau”